

**PENGARUH INDEPENDENSI, KOMPETENSI AUDITOR, *PROACTIVE FRAUD* AUDIT TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD***  
(Studi Kasus Pada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumatera Selatan)

**SKRIPSI**



**Nama : Wilmi Dwi Putri Astuti**

**NIM : 222017202**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**2021**

**SKRIPSI**

**PENGARUH INDEPENDENSI, KOMPETENSI AUDITOR, *PROACTIVE FRAUD* AUDIT TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD***

**(Studi Kasus Pada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumatera Selatan)**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Wilmi Dwi Putri Astuti**

**NIM : 222017202**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**2021**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wilmi Dwi Putri Astuti  
NIM : 222017202  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Pemeriksaan Akuntansi  
Judul Skripsi : Pengaruh Independensi, Kompetensi Auditor, dan  
*Proactive Fraud* Audit terhadap Pencegahan *Fraud*

Dengan ini Saya Menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Januari 2021

  
Wilmi Dwi/Putri Astuti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Pengaruh Independensi, Kompetensi Auditor, dan Proactive  
Fraud Audit terhadap Pencegahan Fraud

Nama : Wilmi Dwi Putri Astuti  
NIM : 222017202  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Audit Forensik dan Investigasi

Diterima dan Disahkan  
Pada Tanggal, Januari 2021

Pembimbing I,

Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., AK., CA  
NIDN/NBM : 0216106902/944806

Pembimbing II,

Darmavanti, S.E., AK., M.M., CA  
NIDN/NBM : 0219057901/1187172

Mengetahui,  
Dekan  
dan Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., AK., CA  
NIDN/NBM : 0216106902/944806

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*MOTTO :*

*“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya”*

*(Q.S Ath-Thalaq:2-3)*

*(Wilmi Dwi Putri Astuti)*

*Skripsi ini ku persembahkan kepada:*

- 1. Kedua orang tuaku, mama dan papa*
- 2. Kakakku tersayang*
- 3. Dosen Pembimbing*
- 4. Almamaterku*

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## PRAKATA

**Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh**

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Pengaruh Independensi, Kompetensi Auditor, *Proactive Fraud* Audit Terhadap Pencegahan *Fraud* (Studi Kasus Pada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumatera Selatan)**”. Skripsi ini penulis ajukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua yang telah mendidik, membiayai, mendoakan dan memberikan motivasi yang besar kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA dan Ibu Darma Yanti, S.E., Ak., M.M., CA yang telah membimbing dan selalu memberikan pengarahan serta saran-saran yang tulus, ikhlas dan bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor beserta Staf dan Karyawan Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M, selaku Dekan beserta Staf dan Karyawan Universitas Muhammdiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA selaku ketua Program Studi Akuntansi & Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhmmadiyah Palembang.
5. Pimpinan dan Seluruh Staff Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumatera Selatan yang telah membantu dalam memberikan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas kebaikan kalian, akhirulkalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal ibadah kalian semua mendapat balasan dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Wassalmu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Palembang, Januari 2021

Penulis

Wilmi Dwi Putri Astuti

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	16
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS.....</b>	<b>17</b>
A. Landasan Teori.....	17
1. Teori Kontijensi.....	17
2. Teori Atribusi.....	18
3. Pencegahan Kecurangan.....	18
4. Independensi.....	28
5. Kompetensi Auditor.....	35
6. <i>Proactive Fraud</i> Audit.....	40
B. Penelitian Sebelumnya.....	43
C. Kerangka Berpikir.....	47
1. Keterkaitan Independensi, Kompetensi Auditor, <i>Proactive Fraud</i> Audit Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> .....	47



a. Pengaruh Independensi, Kompetensi Auditor, <i>Proactive Fraud</i> Audit Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> .....	47
b. Pengaruh Independensi terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> .....	48
c. Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> .....	50
d. Pengaruh <i>Proactive Fraud</i> Audit terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> .....	51
D. Hipotesis.....	53
1. Secara Bersama.....	53
2. Secara Parsial.....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Lokasi Penelitian.....	55
C. Operasionalisasi Variabel.....	55
D. Populasi dan Sampel.....	56
E. Data yang digunakan.....	56
F. Metode Pengumpulan Data.....	57
G. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	59
1. Analisis Data.....	59
2. Teknik Analisis.....	61
a. Uji Validitas dan Reabilitas.....	62
b. Statistik Deskriptif.....	63
c. Uji Normalitas.....	63
d. Uji Asumsi Klasik.....	64
e. Uji Hipotesis.....	65
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>69</b>
A. Hasil Penelitian.....	69
1. Gambaran Singkat Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.....	69
2. Gambaran Umum Responden Penelitian.....	70
3. Gambaran Jawaban Responden.....	73
4. Statistik Deskriptif.....	76
5. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	77

6. Hasil Pengolahan Data.....	93
a. Uji Validitas.....	93
b. Uji Reliabilitas.....	95
c. Uji Asumsi Klasik.....	96
1) Uji Normalitas.....	96
2) Uji Multikolinieritas.....	98
3) Uji Heteroskedastisitas.....	99
d. Uji Hipotesis.....	100
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	105
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>114</b>
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	115

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel II.1	Persamaan dan Perbedaan Hasil Penelitian Sebelumnya.....46
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel.....55
Tabel IV.1	Sampel Penelitian.....72
Tabel IV.2	Profil Responden.....73
Tabel IV.3	Hasil Total Jawaban Responden.....75
Tabel IV.4	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....76
Tabel IV.5	Indikator <i>Independence In Fact</i> .....77
Tabel IV.6	Indikator Lama Hubungan Dengan Klien.....78
Tabel IV.7	Indikator Tekanan Dari Klien.....79
Tabel IV.8	Indikator Telaah Dari Rekan.....80
Tabel IV.9	Indikator Jasa Non Audit.....81
Tabel IV.10	Indikator Pendidikan.....81
Tabel IV.11	Indikator Pengatahuan.....82
Tabel IV.12	Indikator Pengalaman.....83
Tabel IV.13	Indikator Pelatihan.....84
Tabel IV.14	Indikator <i>Identifikasi Risk Exposure</i> .....85
Tabel IV.15	Indikator Identifikasi Gejala <i>Fraud</i> Untuk Setiap <i>Exposure</i> .....86
Tabel IV.16	Indikator Program audit Harus Secara Proaktif Menjadi Gejala dan <i>Exposure</i> .....87
Tabel IV.17	Indikator Melakukan Pendekatan Audit Investigatif Pada Gejala <i>Fraud</i> Yang Teridentifikasi.....88
Tabel IV.18	Indikator Menerapkan Sistem Pengendalian Interen Yang Baik....89
Tabel IV.19	Indikator Mengefektifkan Aktivitas Pengendalian.....90
Tabel IV.20	Indikator Meningkatkan Kultur Pengelolaan Perusahaan.....91
Tabel IV.21	Hasil Pengujian Validitas Variabel Independensi.....93

Tabel IV.22	Hasil Pengujian Validitas Variabel Kompetensi Auditor.....	94
Tabel IV.23	Hasil Pengujian Validitas Variabel <i>Proactive Fraud</i> Audit.....	94
Tabel IV.24	Hasil Pengujian Validitas Variabel Pencegahan <i>Fraud</i> .....	95
Tabel IV.25	Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian.....	96
Tabel IV.26	Hasil Uji Normalitas.....	97
Tabel IV.27	Hasil Uji Multikoleniaritas.....	98
Tabel IV.28	Hasil Uji Heterkesdastisitas Metode Uji Glejser.....	100
Tabel IV.29	Hasil Koefisien Determinasi.....	101
Tabel IV.30	Hasil Uji Bersama-sama.....	101
Tabel IV.31	Hasil Uji T Parsial.....	102
Tabel IV.32	Hasil Uji Regresi.....	104

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1.1	Sektor dengan Jumlah Kasus Terkorup di Indonesia.....2
Gambar 1.2	Pengaduan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.....3
Gambar 1.3	Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 s.d 2019.....6
Gambar II.1	Kerangka Pemikiran.....52
Gambar IV.1	Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan.....71
Gambar IV.2	Hasil Uji Normalitas Metode Grafik.....97
Gambar IV.3	Hasil Uji Heterokedastisitas Pola Pada Titik Scatterplot.....99

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 Hasil Kuesioner (Skala Interval)
- Lampiran 3 Tabel Statistik
- Lampiran 4 Hasil Uji Data SPSS Versi 25
- Lampiran 5 Fotocopy Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 Surat Keterangan Riset
- Lampiran 7 Fotocopy Sertifikat AIK
- Lampiran 8 Fotocopy Sertifikat SPSS
- Lampiran 9 Fotocopy Plagiarism
- Lampiran 10 Sertifikat yang Dimiliki
- Lampiran 11 Biodata Penulis

## **ABSTRAK**

**Wilmi Dwi Putri Astuti/222017202/2021/Pengaruh Independensi, Kompetensi Auditor, *Proactive Fraud Audit* Terhadap Pencegahan *Fraud* Studi Kasus Pada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumatera Selatan/Audit Forensik dan Investigasi.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, dan mendapatkan bukti empiris serta menganalisis Independensi, Kompetensi Auditor, *Proactive Fraud Audit*. Penelitian ini termasuk penelitian Asosiatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Auditor yang bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumatera Selatan, Sampel dalam penelitian ini sebanyak 33 responden. Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Uji hipotesis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial Independensi berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*, Kompetensi Auditor berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*, dan *Proactive Fraud Audit* berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*. Secara Simultan Independensi, Kompetensi Auditor dan *Proactive Fraud Audit* berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*.

**Kata Kunci: Independensi, Kompetensi Auditor, *Proactive Fraud Audit*, *Fraud*.**

## ABSTRACT

*Wilmi Dwi Putri Astuti/222017202/2021/The Influence of Independence, Auditor Competence, Proactive Fraud Audit on Fraud Prevention Case Study at the Indonesian Supreme Audit Institution, South Sumatra Representative / Forensic Audit and Investigation.*

*The research aimed was to determine, obtain the empirical evidence and analyze the Independence, Auditor Competence, and Proactive Fraud Audit on Fraud Prevention. This research used associative research. Populations of this research were the auditors who work at the Indonesian supreme audit institution, South Sumatra Representative. Numbers of the sample of this research were 33 respondents. The data collection method used was a questionnaire. The hypothesis test used was multiple linear regressions. The results of this study partially indicated that independence had a significant effect on Fraud Prevention, Auditor Competence had a significant effect on Fraud Prevention, and Proactive Fraud Audit had a significant effect on Fraud Prevention. Simultaneously, Independence, Auditor Competence and Proactive Fraud Audit had a significant effect on Fraud Prevention.*

**Keywords:** *Independence, Auditor Competence, Proactive Fraud Audit, Fraud*

NO	NAMA	NIM	PETERANGAN
A52	Wilmi Dwi Putri Astuti	222017202	





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kecurangan telah berkembang di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Persaingan dan faktor tekanan yang terjadi dari sisi pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat awam tidak menutup kemungkinan akan mengubah perilaku bisnis kearah persaingan yang tidak sehat sehingga melakukan suatu kecurangan. Kecurangan biasanya dapat kita lihat dari laporan keuangan, setiap perusahaan mempunyai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi serta menunjukkan kinerja yang dilakukan manajemen.

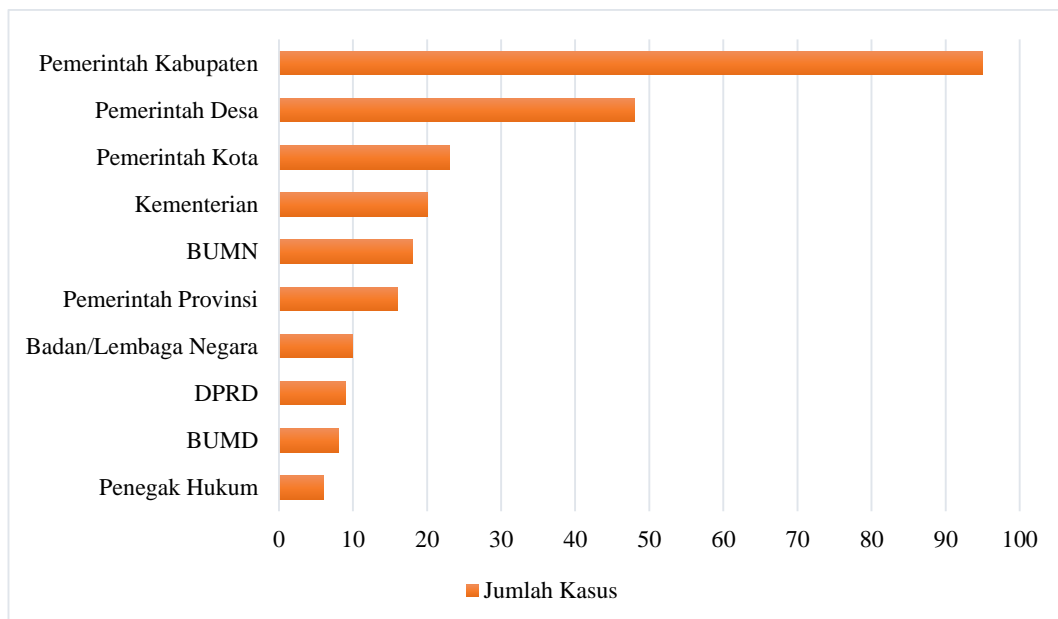
Mekanisme pelaporan keuangan, suatu audit dirancang untuk memberikan sebuah informasi yang meyakinkan bahwa laporan keuangan tersebut tidak salah saji (*miss statements*) yang bersifat material dan juga memberikan keyakinan yang memadai atas akuntabilitas manajemen terhadap aktiva perusahaan. Salah saji terdiri dari dua macam kekeliruan (*errors*) dan kecurangan (*fraud*) (Soemarso, 2018: 294). Laporan keuangan jika disajikan tidak sesuai dengan fakta atau kekeliruan salah saji dan penghilangan secara sengaja maka dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan tindak kecurangan.

Menurut Bona (2015: 2) mengatakan bahwa *fraud* adalah setiap perbuatan tidak jujur (penyalahgunaan kedudukan/jabatan atau penyimpangan) yang bertujuan mengambil (atau harta atau sumber daya orang lain/organisasi) melalui akal bulus, tipu muslihat, penipuan, kelecikan, penghilangan,

kecurangan, saran yang salah, menyembunyian atau cara-cara lainnya yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang, yang mengakibatkan kerugian organisasi atau orang lain dan/atau menguntungkan pelaku.

Pada tahun 2019, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mempublikasi nilai kerugian negara yang terjadi selama tahun 2019. Berdasarkan pengamatan ICW selama tahun 2019 telah terjadi kecurangan negara dengan jumlah 271 kasus, jumlah tersangka sebanyak 580 orang, jumlah kerugian negara sebesar Rp8,4 triliun serta jumlah suap sebesar Rp200 miliar, jumlah pungutan liar sebesar Rp3,7 miliar dan jumlah pencucian uang sebesar Rp108 miliar.

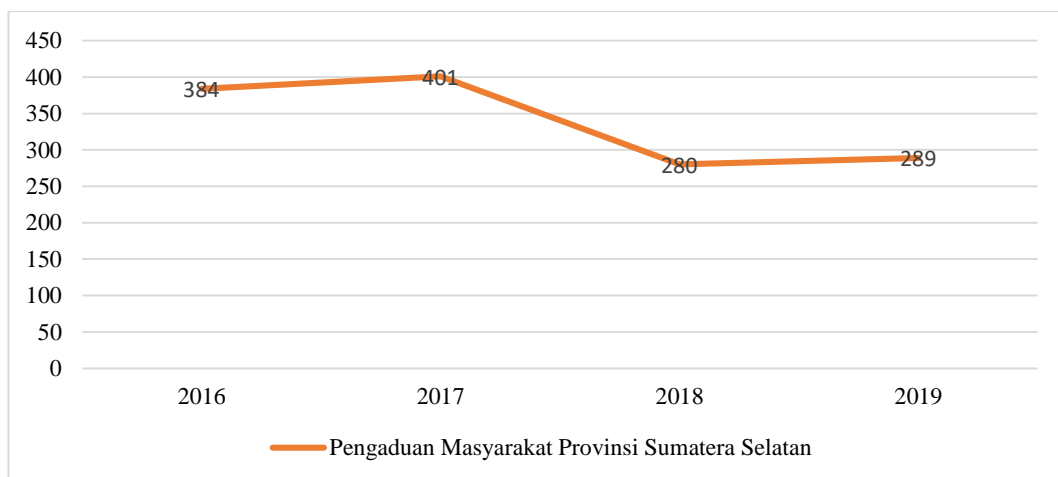
**Gambar I.1**  
**Sektor dengan Jumlah Kasus Terkorup di Indonesia**



Sumber: diolah dari Indonesian Corruption Watch (ICW)

Berdasarkan data yang diperoleh dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW) tahun 2019, dapat dilihat bahwa kecurangan lebih sering terjadi pada sektor pemerintah. Sektor pemerintah yang diaplikasikan oleh pemerintah kabupaten memiliki jumlah kasus sebesar 95 kasus, pemerintah desa sebanyak 48 kasus, pemerintah kota sebanyak 23 kasus, kementerian sebanyak 20 kasus, sektor BUMN sebanyak 18 kasus, pemerintah provinsi sebanyak 16 kasus, Badan/Lembaga Negara 10 kasus, DPRD 9 kasus, BUMD 8 kasus dan terakhir penegak hukum sebanyak 6 kasus. Hal ini berkesinambung dengan jumlah pengaduan masyarakat terhadap kasus kecurangan, dikarenakan masyarakat meragukan kinerja dan kemampuan pihak yang seharusnya dapat mencegah kecurangan.

**Gambar I.2**  
**Pengaduan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan**



Sumber : diolah dari Laporan Tahunan KPK 2016-2019

Berdasarkan gambar I.2 pengaduan masyarakat provinsi Sumatera Selatan terkait kecurangan mengalami kenaikan dan penurunan, pada tahun 2016 terdapat sejumlah 384 pengaduan, lalu mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 401 pengaduan masyarakat, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 280 jumlah pengaduan, akan tetapi pada tahun 2019 jumlah pengaduan masyarakat mengalami kenaikan sedikit sebesar 289 jumlah pengaduan. Penurunan dan kenaikan jumlah pengaduan ini membuat masyarakat meragukan kemampuan auditor pemerintah, karena pengaduan masyarakat merupakan bentuk pengawasan atas standar pelayanan publik yang telah ditetapkan, dan menjadi salah satu tolok ukur yang mencerminkan kinerja pemerintah.

BPKP (2008:11-12) menjelaskan secara umum kecurangan mengandung tiga unsur penting yang terdiri atas perbuatan tidak jujur, niat atau kesengajaan, dan keuntungan yang merugikan orang lain. Sementara, pencegahan kecurangan yang dilakukan merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab kecurangan, karena faktor pengungkapan sangat berkaitan dengan kemungkinan dapat diungkapnya suatu kejadian *fraud*. Semakin besar kemungkinan *fraud* dapat diungkap maka akan semakin kecil kesempatan seseorang untuk melakukannya, sehingga auditor dituntut untuk tetap waspada terhadap setiap hal yang mencurigakan dan menunjukkan adanya indikasi kecurangan.

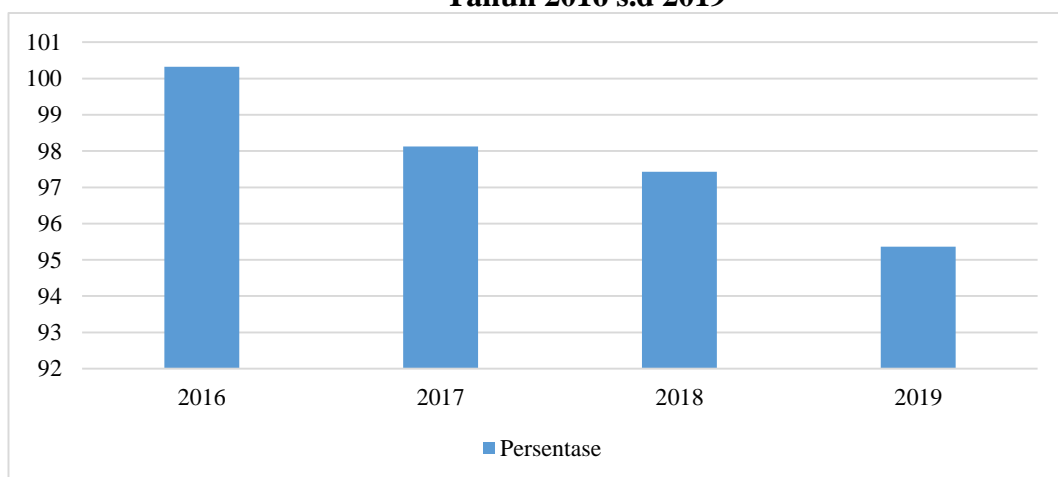
Peran auditor pemerintah sangat dibutuhkan, karena sebagai pihak yang netral dan independen. Mulyadi (2017: 29) auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan unit-unit organisasi atau pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Adanya peran auditor diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara sistematis dan kritis dalam mengaudit maupun dalam menemukan gejala-gejala kecurangan dalam proses pengauditan suatu entitas.

Auditor eksternal pemerintah yang diimplementasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dibentuk sebagai perwujudan pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) merupakan lembaga tinggi negara yang bebas dan mandiri serta termasuk dalam sistem ketatanegaraan yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yang didasarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjelaskan bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2006 BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Pengaplikasian tanggung jawab tersebut dapat dilihat dari Laporan Kinerja BPK.

**Gambar I.3**  
**Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan**  
**Tahun 2016 s.d 2019**



Sumber: diolah dari Laporan Kinerja Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, dapat dilihat bahwa kinerja BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, terlihat dimulai dari data tahun 2016 jumlah skor kinerja yang diperoleh adalah sebesar 100,32 dan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 2,19 sehingga menjadi 98,13. Pada tahun 2018 skor kinerja mengalami penurunan menjadi 97,42 dan pada tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar 2,06 sehingga menjadi

95,36. Penurunan skor kinerja BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan membuat kekhawatiran, seharusnya BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan peningkatan kinerja BPK, dalam hal ini pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, serta BUMD dan lembaga yang terkait di lingkungan entitas tersebut mampu menerapkan peran strategis tersebut dengan mengimplementasikan ke dalam hasil kinerja yang baik.

Upaya-upaya yang dilakukan entitas untuk meningkatkan kinerja tidak akan tercapai jika dalam suatu entitasnya masih terdapat tindakan-tindakan kecurangan. Salah satu kemampuan yang mendukung auditor dalam menjalankan tugas auditnya berupa mencegah indikasi terjadinya *fraud*, yakni auditor harus mengerti dan memahami ruang lingkup kecurangan. Penerapan untuk perbaikan efek jera dan memperkecil kerugian akibat kecurangan jika ada indikasi kuat bahwa terjadinya suatu kecurangan, maka seorang auditor harus memiliki sikap independensi. Menurut Mulyadi (2013: 26-27) independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak terpengaruh pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Mathius (2016: 156) auditor dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam mencegah kecurangan perlu didukung oleh sikap kompetensi. Kompetensi berhubungan dengan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sehingga auditor yang berkompoten adalah auditor yang memiliki pengetahuan, pelatihan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai agar bisa berhasil mengerjakan pekerjaan auditnya. Oleh karena itu, auditor harus mempunyai kompetensi yang baik agar tidak gagal dalam mencegah indikasi gejala-gejala kecurangan, dan apabila kecurangan tersebut dapat tercegah, auditor tidak ikut menyembunyikan kecurangan tersebut.

Selain kompetensi auditor, penerapan *proactive fraud* audit pada pencegahan *fraud* sangatlah penting, *proactive fraud* audit sebagai proses audit yang dilaksanakan atas indikasi *fraud* sebelum tindakan *fraud* tersebut terjadi untuk menemukan kemungkinan adanya suatu kecurangan atau kejahatan secara lebih dini sebelum berkembang menjadi kecurangan yang lebih besar lagi dengan demikian efektifitas pengungkapan dan pencegahan kecurangan akan memberikan nilai tambah untuk *recovery* kerugian yang terjadi. BPKP (2019: 45) *proactive auditing* adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen yang ditujukan untuk pencegahan *fraud*. *Proactive* audit merupakan suatu proses audit yang dilaksanakan atas indikasi *fraud* sebelum tindakan *fraud* tersebut terjadi atau belum memenuhi seluruh ‘unsur’ tindak pidana atau dalam rangka meminimalisasi dampak dari tindakan *fraud*; baik dampak keuangan maupun



dampak non-keuangan. Zimbleman, et al (2014: 454) organisasi yang melakukan audit kecurangan secara proaktif meningkatkan kesadaran di antara pegawai bahwa tindakan mereka selalu ditinjau, dengan meningkatnya ketakutan akan terungkap, *auditing* secara proaktif mengurangi perilaku kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi dan Made (2019), Yayuk dan Hayati (2014), Made dan Gede (2016) menyatakan bahwa independensi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Namun berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Christine dan David (2020), I Komang, dkk (2020) menyatakan independensi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Penelitian yang dilakukan oleh Made dan Gede (2016), Marcellina dan Sugeng (2009), menyatakan bahwa kompetensi auditor berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dan penelitian Hernawari Kadir (2017) menyatakan bahwa kompetensi auditor berpengaruh namun tidak signifikan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristiana dan Cahyo (2018), Nurul Huda, dkk (2018) menyatakan bahwa kompetensi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh I Made, dkk (2017), I Kadek (2017), dan Anantawikrama, dkk (2019) menyatakan bahwa *proactive fraud* audit berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Irna, dkk (2019) yang menyatakan bahwa *proactive fraud* audit tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020 BPK memeriksa 89 laporan keuangan, yaitu 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019, 86 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2019, 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2019, serta 1 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2019. BPK memeriksa 86 (LKKL) Tahun 2019 dan 1 (LKBUN) Tahun 2019. Hasil pemeriksaan mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 83 LKKL dan 1 (LKBUN), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 2 LKKL, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 1 (LKKL) Hasil pemeriksa tersebut tidak termasuk LK BPK Tahun 2019 yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik dan memperoleh opini WTP. ( [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) )

Fenomena yang terjadi di Sumatera Selatan yakni Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumsel di Jalan Demang Lebar Daun pada hari rabu tanggal 11 Maret 2020 didatangi tak kurang dari 100-an massa. Kedatangan massa yang diantaranya mak-mak ini mengatas namakan elemen dari Masyarakat Miskin Kota (MMK) Sumsel, ini kali kedua mereka menggeruduk kantor BPK RI Perwakilan Sumsel setelah beberapa waktu yang lalu masih dengan tuntutan yang sama. Mereka mendesak BPK RI Perwakilan Sumsel untuk bersikap transparan membuka hasil audit terhadap sejumlah proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum Bina Mara (PUBM) Sumsel. Menurut koordinator MMK Sumsel, Arifin pasalnya dari informasi yang diterima berdasarkan audit yang telah dilakukan BPK ada sejumlah

kelebihan nilai volume pekerjaan yang harus dikembalikan dan itu nilainya mencapai miliaran rupiah. Semua proyek jalan beton di Kabupaten/Kota terutama di Kabupaten Ogan Ilir (OI dan Kabupaten OKU Timur (OKUT) yang nilai proyek-proyeknya diatas Rp10 miliar lebih bahkan ada yang mencapai Rp70 miliar, diduga ada indikasi penyimpangan. Selain itu, peningkatan jalan Dabu Rejo-Batas Kabupaten OKU Timur sebesar kurang lebih Rp25 miliar dan peningkatan jalan Kurungan Nyawa-Gumawang (DAK) sebesar kurang lebih Rp74 miliar. Arifin mempertanyakan berapa besaran kelebihan volume yang harus dikembalikan, dan mewanti-wanti jangan sampai ada indikasi penyimpangan. Ia mencontohkan, misalnya proyek A ada temuan harus mengembalikan Rp18 miliar dan ternyata ada indikasi cuma dikembalikan sekitar Rp1,9 miliar hingga Rp5 miliar, kemudian diproyek B ada dugaan temuan yang harus mengembalikan Rp12 miliar ternyata ada indikasi cuma dikembalikan sekitar Rp1,8 miliar atau Rp3 miliar. Arifin mengatakan jangan ada indikasi kongkalingkong antara oknum BPK dan pemborong, apabila ada temuan dan terjadi indikasi penyimpangan MMK Sumsel meminta audit ulang hasil temuan BPK. ([www.sumeks.com](http://www.sumeks.com))

Selanjutnya, kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan hingga kini masih jalan di tempat lantaran hasil auditnya sudah hampir setahun tak kunjung keluar, seperti kasus TPU Baturaja, BNI, BSB, Korupsi Pembangunan gerbang Kota Palembang, Samsat Palembang dan kasus korupsi lainnya. Indra Zuardi selaku Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan juga menyatakan bahwa lambannya BPK dan BPKP dalam

melakukan audit terhadap kasus-kasus korupsi yang ada di Sumatera Selatan yang juga perlu dipertanyakan. Terlebih dengan UU Keterbukaan Publik, BPKP dan BPK harus transparan dalam memberikan hasil audit yang telah dilakukan kepada masyarakat baik melalui media cetak dan elektronik, situs resmi BPK dan BPKP maupun ditempel. ( [www.sumsel.tribunnews.com](http://www.sumsel.tribunnews.com) )

Aktivis *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Emerson menyatakan bahwa antara tahun 2015 hingga Mei 2017, terdapat enam kasus suap yang melibatkan 23 auditor dan pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), enam kasus suap itu melibatkan Komisi Pemilihan Umum, pemerintah Bekasi, pemerintah Tomohon, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, proyek E-KTP di Kementerian Dalam Negeri, dan terakhir Kementerian Desa Pembangun Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tiga kasus suap untuk mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, 1 kasus suap untuk mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian, 1 kasus suap untuk mengubah hasil temuan BPK, dan 1 kasus suap untuk membantu kelancaran proses audit, pada kasus-kasus tersebut, nilai suap terkecil adalah Rp80 juta per orang sedangkan yang terbesar adalah Rp1,6 miliar. ( [www.kompas.com](http://www.kompas.com) )

Kasus selanjutnya anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil mengklaim tidak pernah ada perubahan dari hasil pemeriksaan terhadap Direktorat Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kementerian PUPR. Hal tersebut diungkapkan mengacu pada kasus dugaan suap terkait proyek SPAM di Kementerian PUPR yang menjerat dirinya sebagai tersangka KPK. Rizal mengatakan bahwa tidak ada satu huruf pun satu angka pun yang ia ubah

kebenarannya, untuk memperkuat klaimnya, ia menunjukkan berkas LPH (laporan hasil pemeriksaan) terhadap Direktorat SPAM kepada para wartawan peliput di KPK. Dalam kasus ini, KPK menduga ada perubahan hasil pemeriksaan terhadap Direktorat SPAM yang dilakukan BPK. Awalnya pemeriksaan menemukan adanya penyelewengan dana sebesar Rp18 miliar, namun temuan kemudian berubah menjadi Rp4,2 miliar. Pemeriksaan tersebut dilakukan BPK berdasarkan Surat Tugas BPK RI tertanggal 21 Oktober 2016 yang ditandatangani dalam kapasitas sebagai anggota IV BPK. Menanggapi dugaan terkait pemanggilan pejabat ke BPK, Rizal mengatakan menurut UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, pejabat yang menjalani pemeriksaan wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LPH. ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com) )

Fenomena yang terjadi pada pertengahan 2017 yakni suap opini WTP yang mengkhawatirkan. Pusat Kajian Keuangan Negara menyayangkan adanya penangkapan auditor utama Keuangan Negara III BPK RI yang diduga terkait kenaikan status dari WDP ke WTP di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT). Dua auditor yang diamankan KPK adalah Auditor Utama Keuangan Negara III Rochmadi Saptogiri dan Plt Kepala Auditorat di Auditorat Keuangan Negara III Ali Sadli. Menurut Adi Prasetyo selaku Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Negara, peristiwa itu merupakan fenomena yang menjadi pukulan dan evaluasi internal bagi lembaga audit BPK RI. Khususnya, dalam menegakkan akuntabilitas sesuai prinsip independensi, integritas, dan profesional. Fenomena ini sebenarnya

mengkhawatirkan sebagai institusi pengawasan keuangan, BPK harusnya menjadi ujung tombak atas tata kelola anggaran di APBN. ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id))

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku kecewa dengan kejadian suap yang menimpa auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diduga terkait dengan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Kementerian Desa PDTT. Sri Mulyani menilai kemitraan antara Kementerian Lembaga dengan BPK sudah terjalin dengan baik dan profesional, sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk pertama kalinya dalam 12 tahun mendapat opini WTP. Untuk itu, apabila terdapat upaya penyalahgunaan wewenang dan dugaan suap terkait pemberian opini WTP terhadap Kementerian Lembaga tertentu, Sri Mulyani meminta aparat hukum untuk mengusut tuntas. Terkait pemberian opini WTP, Sri Mulyani mengharapkan status tersebut bisa dilaksanakan secara konsisten oleh Kementerian Lembaga agar penyusunan LKPP makin berkualitas dan penggunaan dana APBN dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam kesempatan terpisah, anggota BPK Agung Firman Sampurna berupaya meyakinkan masyarakat bahwa opini yang diberikan atas laporan keuangan terhadap pemerintah pusat maupun daerah sudah melalui sistem yang teruji. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua auditor BPK, atas dugaan penyuaan terkait pemberian opini WTP untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. ( [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id) )

Fenomena yang didapat dari kasus diatas banyak menimbulkan pertanyaan, melihat masih banyaknya terjadi kasus penyimpangan-penyimpangan yang terjadi ditambah dengan skor kinerja BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan yang dari tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan, sehingga menimbulkan pertanyaan, bagaimana kinerja auditor BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan tentang penanganan kasus korupsi dan kecurangan, dengan adanya fenomena tersebut terkait kasus kecurangan, menyebabkan kepercayaan publik akan kemampuan auditor menjadi menurun, mengapa auditor eksternal yang diimplementasikan oleh BPK gagal dalam mencegah kecurangan laporan keuangan seperti contoh kasus diatas. Seharusnya auditor pemerintah yakni BPK yang bertugas dalam audit sektor pemerintahan mampu menjalankan proses pengauditan dan pemeriksaan secara tepat dalam mencegah indikasi kecurangan yang terjadi, sehingga tidak akan terjadi kasus-kasus seperti diatas.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Independensi, Kompetensi Auditor, *Proactive Fraud* Audit Terhadap Pencegahan *Fraud*”**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengaruh Independensi, Kompetensi Auditor dan *Proactive Fraud* Audit terhadap Pencegahan *Fraud* ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh independensi, kompetensi auditor, *proactive fraud* audit terhadap pencegahan *fraud*.

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

#### 1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan, pemahaman dan wawasan pengaruh independensi, kompetensi auditor, *proactive fraud* audit terhadap pencegahan *fraud*.

#### 2. Bagi Auditor Pada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumatera Selatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menggugah para auditor dalam melaksanakan tugasnya selain mematuhi standar umum audit juga harus senantiasa meningkatkan independensi, kompetensi auditor, *proactive fraud* audit terhadap pencegahan *fraud* agar dapat meminimalisir *fraud* sehingga menghasilkan pemeriksaan yang tepat dan akurat.

#### 3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan referensi tambahan menambah ilmu pengetahuan untuk para peneliti selanjutnya yang akan meneliti agar menjadi acuan atau kajian serta pertimbangan tentang hal serupa dimasa yang akan datang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2020). *MMK Desak BPK Buka Hasil Audit Kelebihan Dana Pengerjaan Proyek Dinas PUBM Sumsel*. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2020. <https://sumeks.co/mmk-desak-bpk-buka-hasil-audit-kelebihan-dana-pengerjaan-proyek-dinas-pubm-sumsel/>
- Amin Widjaja Tunggal. (2013). *The Fraud Audit: Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan Akuntansi*. Jakarta: Harvarindo.
- Amrizal Sutan Kayo. (2013). *Audit Forensik: Penggunaan dan Kompetensi Auditor Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Anantawikrama Tungga Atmadja, dkk. (2019). *Proactive Fraud Audit, Whistleblowing and Cultural Implementation of Tri Hita Karana for Fraud Prevention*. European Research Journal. Vol 22 No. 3, 2019: 201-214.
- Arfan Ikhsan Lubis. (2019). *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arum Ardianingsih. (2018). *Audit Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2019). *Laporan Kinerja Tahun 2019 BPK Perwakilan Sumatera Selatan*. Diakses pada tanggal 06 November 2020. <https://sumsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/04/LAKIN-2019-BPK-Sumsel.pdf>.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2020). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020*. Diakses pada tanggal 08 November 2020. [https://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2020/I/ihps\\_i\\_2020\\_1604907820.pdf](https://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2020/I/ihps_i_2020_1604907820.pdf).
- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. (2019). *Proactive Auditing Instrumen Pencegahan Fraud*. Jakarta: Deputi Bidang Investigasi..
- Bayu Hermawan. *Sri Mulyani Kecewa dengan Kasus Suap BPK*. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2020. <https://m.republika.co.id/berita/oqpyky354/sri-mulyani-kecewa-dengan-kasus-suap-bpk>
- BPKP. (2008). *Fraud Auditing Kode MA: 2.140*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP dalam rangka Diklat Sertifikasi JFA Tingkat Penjenjang Auditor Ketua Tim: Bogor.
- Betri. (2018). *Akuntansi Forensik & Audit Investigasi* (Edisi 10). Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Bona P. Purba. (2015). *Fraud dan Korupsi Pencegahan, Pendeteksian dan Pemberantasannya*. Jakarta: Lestari Kinamata

- CNN Indonesia. (2019). *Rizal Djajil Klaim Tak Ada Perubahan di Audit BPK atas SPAM*. Diakses pada tanggal 24 November 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191009175328-12-438150/rizal-djalil-klaim-tak-ada-perubahan-di-audit-bpk-atas-spam>
- Christine Lie Wijaya dan David Adechandra A.P. (2020). *Pengaruh Profesionalisme dan Independensi Terhadap Pencegahan Kecurangan dengan Iklim Etika-Egoisme sebagai Variabel Moderasi*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 9, No.1, 2020: 78-89.
- Dewi Novita Wulandari. (2018). *Pengaruh Pengendalian Internal, Kesadaran Anti-Fraud, Integritas, Independensi, dan Profesionalisme terhadap Pencegahan Kecurangan*. Skripsi. Jakarta: FEB-Usakti:.
- Diaz Priantara. (2013). *Fraud Auditing & Investigation*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dwi Andriyanti dan Made Yenni Latrini. (2019). *Pengaruh Pengalaman, Independensi, dan Profesionalisme Auditor Internal Dalam Mencegah Kecurangan Pada Bank Perkreditan Rakyat*. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.27, No. 1, 2019:475-504.
- Felix I. Lessambo. (2018). *Auditing and Assurance Service and Forensic*. Swiss: Palgrave Macmillan.
- Fitrawansyah. (2014). *Fraud & Auditing*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hernawari Kadir. (2017). *Pengaruh Pengendalian Internal dan Kompetensi Auditor Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pencegahan Fraud (Studi Pada Auditor Inspektorat Kota Kendari)*. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 2 No. 1, 2017: 39-54.
- Ihsanuddin. (2017). *ICW: Sejak 2005, Ada 6 Kasus Suap Libatkan 23 Pejabat KPK*. Diakses pada tanggal 12 Desember 2020. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2017/05/27/14054551/icw.sejak.2005.ada.6.kasus.suap.libatkan.23.pejabat.bpk>
- Indonesia Corruption Watch. 2019. *Tren Penindakan Kasus Korupsi*. Diakses pada tanggal 15 November 2020. [https://antikorupsi.org/sites/default/files/200215-tren\\_penindakan\\_kasus\\_korupsi\\_tahun\\_2019\\_final\\_2.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/200215-tren_penindakan_kasus_korupsi_tahun_2019_final_2.pdf)
- I Gusti Agung Rai. (2008). *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- I Made Indra Dwi Putra Suastawan. (2017). *Pengaruh Budaya Organisasi, Proactive Fraud Audit, dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Bos (Studi Empiris Pada sekolah-sekolah di Kabupaten Buleleng)*. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*. Vol. 7 No.1, 2017.

- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2011). *SA Seksi 110 Tanggung Jawab dan Fungsi Auditor Independen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2011). *SA Seksi 210 Pelatihan dan Keahlian Auditor Independen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2011). *SA Seksi 220 Independensi*. Jakarta: Salemba Empat.
- I Kadek Dwi Ariastini (2017). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Proactive Fraud, dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Dana Bos Se-kabupaten Klungkung*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha. Vol. 8 No.2, 2017.
- I Komang Angga Saputra, dkk. (2020). *Pengaruh Independensi Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Ubud*. Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia. Vol.1, No. 1, 2020: 142-166.
- Irna Puji Lestari, dkk. (2019). *Penerapan Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Efektivitas Whistleblowing System dan Pencegahan Fraud pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Akuntansi. Vol. 2, 2019: 558-563
- Kristiana Durnila dan Cahyo Budi Santoso. (2018). *Pengaruh Audit Forensik dan Kompetensi Auditor Terhadap Pencegahan Fraud dengan Kecerdasan Emosional sebagai Variabel Moderating pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau*. Jurnal Akuntansi. Vol. 12 No.1, 2018: 87-102.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2016). *Laporan Tahunan KPK 2016*. Diakses pada tanggal 08 November 2020. <https://www.kpk.go.id/images/Laporan%20Tahunan%20KPK%202016%20Bahasa%20Indonesia.pdf>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2017). *Laporan Tahunan KPK 2017*. Diakses pada tanggal 08 November 2020. <https://www.kpk.go.id/images/Laporan-Tahunan-KPK-2017-Web.pdf>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). *Laporan Tahunan KPK 2018*. Diakses pada tanggal 08 November 2020. <https://www.kpk.go.id/images/Integrito/LaporanTahunanKPK/Laporan-Tahunan-KPK-2018-.pdf>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Laporan Tahunan KPK 2019*. Diakses pada tanggal 08 November 2020. <https://www.kpk.go.id/images/pdf/Laporan-Tahunan-KPK-2019-Bahasa.pdf>

- Lauw Tjun Tjun, dkk. (2012). *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit*. Jurnal Akuntansi. Vol. 4 No.1, 2012: 33-56.
- M. Ardiansyah. (2015). *Ombudsman Pertanyakan Kinerja BPK dan BPKP Masalah Audit*. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2020. <https://sumsel.tribunnews.com/2015/06/29/ombudsman-pertanyakan-kinerja-bpk-dan-bpkp-masalah-audit>
- Marshall B. Romney & Paul John Steinbart. (2019). *Sistem Informasi Akuntansi Accounting Information System*. Jakarta: Salemba Empat.
- Made dan Gede. (2016). *Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Auditor Internal dalam Mencegah Kecurangan Pada BPR di Kabupaten Bandung*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 17 No.3, 2016: 1924-1952.
- Marcellina Widiyastuti dan Sugeng Pamudji. (2009). *Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan (FRAUD)*. Jurnal Ilmiah Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang. Vol. 5 No. 2, 2009: 52-73.
- Mathius Tandiontong. (2015). *Kualitas Audit dan Pengukurannya*. Jakarta: Alfabeta.
- Mulyadi. (2013). *Auditing*. Buku 1. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2017). *Auditing*. Buku 1. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurul Huda, dkk. (2018). *Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*. Jurnal Citra Widya Edukasi. Vol.10 No. 3, 2018: 243:252.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Restu Agusti dan Nastia Putri Pertiwi. (2013). *Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit*. Jurnal Ekonomi, Vol. 21, No. 3, 2013: 1-13.
- Soemarso S.R. (2018). *Etika dalam Bisnis & Profesi Akuntan dan Tata Kelola Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.

- ST. Nur Irawati. (2011). *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Makassar*. Skripsi pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin Makassar.
- Sofiyah Siregar. (2017). *Statistika Terapan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kencana.
- Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge. (2019). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukrisno Agoes. (2019). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Publik*. Buku 1, Edisi Lima. Cetakan Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Syaiful Bahri. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis Lengkap dengan Teknik Pengolahan Data SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Theodorus M. Tuanakotta. (2014). *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Timothy J. Louwers. (2018). *Auditing and Assurance Service*. New York: McGraw-Hill Education.
- Uma Sekaran & Rouger Bougie. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Buku 1. Edisi Enam. Jakarta: Salemba Empat.
- Umi Nur Fadhila. (2017). *Pusat Kajian Keuangan Negara Sayangnya OTT Auditor Utama BPK*. <https://republika.co.id/berita/oql00e361/pusat-kajian-keuangan-negara-sayangkan-ott-auditor-utama-bpk>. m.republika.co.id.
- V. Wiratna Sujarweni. (2019). *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Wibowo. (2018). *Budaya Organisasi: Sebuah Kebutuhan untuk Meningkatkan Kinerja Jangka Panjang*. Depok: Rajawali Pers.
- Yayuk Ramadhaniyati dan Nur Hayati. (2014). *Pengaruh Profesionalisme, Motivasi, Integritas dan Independensi Satuan Pengawasan Internal dalam Mencegah Kecurangan (Fraud) di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri*. Jaffa, Vol.02 No.2, 2014: 101-104
- Zimbleman et al, dkk (2014). *Akuntansi Forensik*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.